



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Oktober 2018

Kepada Yth,

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2. Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
4. Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2018

TENTANG

**PENEMPATAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN
DAN/ATAU RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG**

Sehubungan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penempatan Gedung Bangunan Kantor dan/atau Rumah Negara yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan penggunaannya sesuai tugas fungsi dan banyaknya pembangunan Gedung Kantor Pengadilan dan/atau Rumah Negara yang telah selesai dan siap untuk ditempati namun satuan kerja yang bersangkutan menunggu proses persetujuan permohonan izin dari Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Seluruh Kuasa Pengguna Barang dan para Ketua/Kepala Pengadilan bahwa Gedung Kantor Pengadilan dan/atau rumah negara yang telah selesai proses pembangunannya dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/pekerjaan, **agar segera menempati** gedung bangunan kantor dan/atau rumah negara tersebut tanpa perlu mengajukan permohonan izin penempatan kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
4. YM. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
7. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
8. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
9. Panitera Mahkamah Agung RI
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
12. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
13. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
14. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI